



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 78/KPN/SK.OT.1.2/VIII/2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- .Menimbang :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul
 - c. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi penugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
 - d. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul maka susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui;
 - e. Bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 95/KPN/SK.OT.1.2/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA** Menetapkan dan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA** : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Agustus 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 78/KPN/SK.OT.1.2/VIII/2024
TANGGAL : 23 Agustus 2024

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
Ketua	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL DIAH PURWADANI, S.H.,M.H.
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL ERWAN HERMAWAN, S.Kom.

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PIDANA DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.
Sekretaris	ASASIPUTIH, S.H. HENDRI WIJAYA, S.H
Anggota	Plt. PANITERA MUDA PIDANA : RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.
	LAILA KIRFAH, S.H. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO

AREA II PENATAAN TATA LAKSANA	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.
Sekretaris	MUHAMMAD REZA JANUAR PRASETYA, S.H. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA : RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.
	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H. JANARTO, S.H. SURADAL IKA HEPSYAWATI, SE SATRIA PINANDITA, S.E ZHRATUSHALIHAH, A.Md.M

AREA III PENATAAN SDM APARATUR	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.
Sekretaris	ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H. DHEA ANANDA NABELLA, A.Md.
Anggota	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA : ARIEF NOOR RAHMAN
	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd MEY LINA SELISTIAWATI, S.E

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.
Sekretaris	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A. FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I
	KASUBBAG PERENCANAAN TI PELAPORAN : YUDI WIDIARSONO, S.Kom.
	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H. AGUS NUR ISRIYADI, S.H. YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md SITI SOLIKHAH, S.H ANA RATNAWATI

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum
Sekretaris	RISKI AYU SWASTIKA, S.H. DIYAN RAHMAWATI
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM : HERI SANTOSA, S.H.
	WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. DIAH PRAVITASIWI, S.H ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. ANJAR DWIYANTO, S.H PRASETYA SUJADI, S.H. SUPRIYADI

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
Sekretaris	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md
Anggota	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN: PRASETYO, S.T.
	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H. HENDRA ANDREA, A.Md MOHAMMAD JAZURI DWI ANGGORO SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,


ARIES SHOLEH EFENDI 

